

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii-iv
Abstrak	v-xiv
Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta oleh: Rohani Budi Prihatin.....	1-16
Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar oleh: Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi	17-28
Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun.....	29-42
Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia oleh: Lukman Nul Hakim	43-55
Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen oleh: Tri Rini Puji Lestari	57-72
Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) oleh: Junius Fernando S. Saragih.....	73-88
Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia oleh: Agus Widiarto	89-103
<i>Ocean Grabbing</i> di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi oleh: Anggalih Bayu Muh. Kamim.....	105-120
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Aspirasi kembali hadir di hadapan pembaca, Volume 11 Nomor 1 Juni 2020 ini menyajikan delapan artikel hasil penelitian dalam tema masalah-masalah sosial di Indonesia. Artikel pertama ditulis oleh Rohani Budi Prihatin, yang secara khusus menelaah pengelolaan sampah di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota-kota tersebut untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme open dumping atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada.

Artikel kedua ditulis oleh Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi, kedua penulis tersebut menelaah dampak kredit usaha rakyat pada sektor usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro dan mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil studinya menyimpulkan bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Artikel ketiga ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun yang secara khusus menelaah pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dalam perspektif UU Penataan Ruang, selain itu, penulis artikel tersebut juga menelaah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang, jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam RUU Cipta Kerja. Hasil telaahnya menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Karena itu, rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja perlu ditinjau kembali.

Lukmanul Hakim pada artikel keempat menulis tentang urgensi revisi Undang-Undang Kesejahteraan Usia Lanjut. Melalui artikel, penulisnya berupaya menjelaskan kajian ilmiah terkini tentang lansia, batasan kategori usia lansia di Indonesia, dan alasan-alasan mengapa revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan, dan peran DPR RI dalam isu ini. Menurut Hakim, para ahli gerontologi memperkenalkan konsep *active ageing* sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif, dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu, revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.

Tri Rini Puji Lestari pada artikel kelima menulis tentang penyelenggaraan keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. Artikel ini berupaya memotret kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Artikel menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut *multiple agency system* di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang

aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.

Junius Fernando S. Saragih dalam artikel keenam menulis tentang penanggulangan kemiskinan perempuan melalui strategi keuangan inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA). Artikel ini secara menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini.

Agus Widiarto dalam artikel ketujuh menganalisis kebijakan pengelolaan guru di Indonesia. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan guru di Indonesia dan merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan pengelolaan guru yang komprehensif dengan mengacu pada pencapaian tujuan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, peran guru sangat penting, yaitu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menjadi sangat strategis sebagai salah satu elemen pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut. Analisis kebijakan ini juga menelaah desain pengelolaan guru dari sisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kajian ini menggunakan model proses analisis kebijakan yang dimulai dari analisis formulasi atau desain kebijakan, permasalahan-permasalahan dalam implementasi, dan evaluasi kebijakannya.

Anggalih Bayu Muh. Kamim dalam artikel kedelapan mengkaji fenomena *ocean grabbing* yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurangan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan dialami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah *ocean grabbing* secara serius. Pertama, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. Kedua, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan, dan menceraiberaub komunitas dari ruang hidupnya. Ketiga, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut.

Jakarta, 30 Juni 2020
Redaksi

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Rohani Budi Prihatin <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p>Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 1-16</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Dua kota yang mengalami pertumbuhan dan menghadapi masalah persampahan adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Berdasarkan tipologi perkotaan dilihat dari sisi populasi, kedua kota ini masuk dalam kategori kota sedang. Kedua kota tersebut secara umum, relatif tidak mengalami masalah persampahan yang akut, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota-kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme <i>open dumping</i> atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada.</p> <p>Kata kunci: Cirebon; pembuangan terbuka; pengelolaan sampah; Surakarta</p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Maria Ulfa <i>Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar</i></p> <p>Mohammad Mulyadi <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p>Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 17-28</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi sebuah instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tidak dapat berjalan sendiri, karenanya perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro; dan (2) Untuk mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan pertimbangan bahwa narasumber atau informan dianggap paling tahu tentang objek permasalahan penelitian ini (<i>key informant</i>). Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Kata kunci: kredit usaha rakyat (KUR); penanggulangan kemiskinan; usaha mikro</p>	

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Vol. 11 No. 1 Juni 2020

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Sri Nurhayati Qodriyatun

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja

Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020
halaman 29-42

ABSTRAK

Banjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan *review* RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.

Kata kunci: bencana banjir; pengendalian pemanfaatan ruang; RUU Cipta Kerja; UU Penataan Ruang

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Lukman Nul Hakim <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p>Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 43-55</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Saat ini kita sedang menyaksikan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia. <i>World Health Organization</i> (WHO) menyebut fenomena ini sebagai kemenangan terbesar umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi lansia terbanyak di dunia. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menempati posisi kelima negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Artikel ini mencoba menjawab bagaimanakah kajian ilmiah terkini tentang lansia? Berapakah sebaiknya batasan kategori usia lansia di Indonesia? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan? Terakhir, bagaimana peran DPR RI mengenai isu ini? Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan kombinasi teknik wawancara dengan pakar dan kajian literatur. Berdasarkan perhitungan <i>dependency ratio</i> oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang nonproduktif sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli gerontologi memperkenalkan konsep <i>active ageing</i> sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif, dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu, revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.</p> <p>Kata kunci: <i>active ageing</i>; bonus lansia; kesejahteraan; lanjut usia; undang-undang</p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Tri Rini Puji Lestari <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p>Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 57-72</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Mengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut <i>multiple agency system</i> di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.</p> <p>Kata kunci: keamanan pangan; konsumen; pangan; pengawasan</p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Junius Fernando S. Saragih <i>Universitas Indonesia</i></p> <p>Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 73-88</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Kemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Sementara kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Di sisi lain perempuan memiliki peluang untuk mengatasi masalah kemiskinannya dan keluarganya dengan pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu tugas mengurus rumah tangga. Berwirausaha adalah pilihan yang tepat, namun perlu diiringi dengan keuangan inklusif yang mendekatkan modal kepada perempuan. Keuangan inklusif ditandai dengan akses terhadap pembiayaan modal usaha tanpa agunan, transaksi keuangan satu pintu, ketersediaan pembiayaan yang melebihi permintaan, dan peningkatan literasi keuangan, meliputi kebiasaan menabung serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini.</p> <p>Kata kunci: keuangan inklusif; literasi keuangan; penanggulangan kemiskinan; keberlanjutan; kesejahteraan</p>	
ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 Juni 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Agus Widiarto <i>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten</i></p> <p>Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia</p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020 halaman 89-103</p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Analisis kebijakan ini bertujuan untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengelolaan guru di Indonesia dan merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan pengelolaan guru yang komprehensif dengan mengacu pada pencapaian tujuan pengelolaan guru sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, peran guru sangat penting, yaitu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menjadi sangat strategis sebagai salah satu elemen pencapaian tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut. Analisis kebijakan ini juga menelaah desain pengelolaan guru dari sisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kajian ini menggunakan model proses analisis kebijakan yang dimulai dari analisis formulasi atau desain kebijakan, permasalahan-permasalahan dalam implementasi, dan evaluasi kebijakannya.</p> <p>Kata kunci: analisis kebijakan; guru profesional; kualifikasi akademik; kualitas pendidikan; pengelolaan guru; sertifikasi guru</p>	

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Vol. 11 No. 1 Juni 2020

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

Anggalih Bayu Muh. Kamim

Universitas Gadjah Mada

***Ocean Grabbing* di Indonesia dan Malaysia:
Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 Juni 2020
halaman 105-120**

ABSTRAK

Kajian ini mendalami fenomena *ocean grabbing* yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurangan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan dialami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan menelusuri laporan penelitian, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan meminjam pendefinisian *ocean grabbing* yang dibuat oleh Bennett, Govan, dan Satterfield serta kriteria yang mereka buat untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di masyarakat pesisir akibat proyek reklamasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah *ocean grabbing* secara serius. *Pertama*, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. *Kedua*, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan, dan mencerabut komunitas dari ruang hidupnya. *Ketiga*, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut.

Kata kunci: investasi; *ocean grabbing*; proyek reklamasi

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Rohani Budi Prihatin <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p><i>Waste Management in Medium Type City: Case Study in Cirebon City and Surakarta City</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 1-16</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>The continuity of development and the rate of economic growth accompanied by an increase in the number of populations generally creates problems in urban areas, which of them is the generation of waste. Among the two cities that are experiencing growth and facing waste problems are Cirebon City and Surakarta City. Based on urban typology based on population, these two cities fall into the medium city category. The average type of city, in general, has relatively not experienced acute waste problems, especially when compared to large cities such as Bandung and Jakarta. This study focused on the preparation of these cities in anticipation of the emergence of garbage problems in the future when they head to and become a big city (population above 1 million). Using in-depth interviews with Environmental Office and garbage bank business actors in waste management in the two cities and the author's direct observation found the fact that waste management in both cities still applied the 3P pattern, i.e. pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), and pembuangan (disposal). This means that waste management is carried out by collecting as much as possible, then transported as quickly as possible and after that disposed of as far as possible. Even more worrying, the running of waste management in the landfill is still managed by an open dumping mechanism or the garbage is only stacked open without any significant management. Sooner or later, waste in these cities will grow faster than the management solution. One day, landfills in the two cities are no longer able to accommodate them.</i></p> <p>Keywords: Cirebon; open dumping; waste management; Surakarta</p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Maria Ulfa <i>Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar</i></p> <p>Mohammad Mulyadi <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p><i>Analysis of the Impact of People's Business Credit on Micro Business Sector towards Poverty Alleviation in Makassar City</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 17-28</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>Community empowerment through micro-business development can be an instrument in poverty alleviation. The development of micro-businesses cannot take place by itself, therefore it needs to get financial support from the government. One form of government's support is the people's business credit (kredit usaha rakyat - KUR) which until now has been running for more than ten years. The purpose of this study was: (1) To determine the impact of the KUR on the micro-business sector; and (2) To determine the impact of the development of micro-businesses on poverty reduction. The type of research used was descriptive with a qualitative approach. The sampling technique in this study was purposive sampling with a consideration that the informants were considered the most knowledgeable about the object of this research problem (key informants). The informants consisted of officials from the Makassar City Office of Cooperatives and SMEs, business actors, and community leaders. Based on the research conducted, it is known that the KUR has a positive impact on the development of micro-businesses in Makassar City and the development of micro-businesses has a positive impact on poverty alleviation.</i></p> <p>Keywords: micro-business; people's business credit; poverty alleviation</p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Sri Nurhayati Qodriyatun <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p><i>Flood Disaster: Supervision and Control Utilization Spaces in the Spatial Law and the Job Creation Bill</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 29-42</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>Floods almost occurred in most parts of Indonesia, including in Bengkulu. The cause of floods in Bengkulu is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. Even though the Spatial Planning Law already regulates how the use of space should be done and how to control it. On the other hand, the government is currently planning to change the rules regarding spatial planning to facilitate licensing in investment through the Job Creation Bill. In the bill, the authority of spatial planning is the authority of the central government. The problem is how the supervision and control of spatial use are carried out in Bengkulu and what about the supervision of spatial use control later if the spatial planning authority is centralized in the central government? By using a literature study, the study shows that the central government and the regional government of Bengkulu have not conducted supervision and control over spatial use as stipulated in the Spatial Planning Law. It was proven that it only conducted a review of Bengkulu Province Spatial Planning without conducting law enforcement for violations of spatial use. On the other hand, the spatial audit conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning was not running as it should. If the authority of spatial planning is centralized to the central government, as stated in the Job Creation Bill, it is feared that the misuse of spatial use in the regions will increase. Likewise, the occurrence of the flood as a result of increased environmental damage due to spatial use that is not following its designation and function. Therefore, it is necessary to review again the plan to revoke the authority of spatial planning at the regency/city level and the provincial government level in the Job Creation Bill.</i></p> <p>Keywords: <i>flood disasters; Job Creation Bill; spatial use management; Spatial Planning Law</i></p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Lukman Nul Hakim <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p><i>The Urgency of The Elderly Welfare Law Revision</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 43-55</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>At present we are witnessing an increasing population of the world's elderly. The World Health Organization (WHO) calls this phenomenon as humanity's greatest triumph. Indonesia is one of the countries with the most elderly population in the world. The WHO predicts that in 2025 Indonesia will occupy the fifth position with the highest percentage of elderly people in the world. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? The researcher uses a qualitative method with a combination of interview techniques and literature studies. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? So if there is an elderly bonus, the burden on productive people will be heavier. Gerontologists introduce the concept of active aging as a solution. A concept that invites us to see the elderly not as burdens but people with economic and social potential. A solutive, comprehensive and implementative policy that is supported by implementers at the central, regional, and community level will make the bonus of the elderly a blessing. Therefore, the revision of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare is urgently called for, with several important things that must be included, namely the principle of humanity, the rights of the elderly, elderly data collection, and economic protection for the elderly.</i></p> <p>Keywords: <i>active aging; elderly; elderly bonus; law; welfare</i></p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Tri Rini Puji Lestari <i>Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI</i></p> <p><i>Food Safety Handling as One of the Community Protection Efforts as a Consumer</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 57-72</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.</i></p> <p>Keywords: <i>consumers; food; food safety; supervision</i></p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Junius Fernando S. Saragih <i>Universitas Indonesia</i></p> <p><i>Women's Poverty Alleviation through Inclusive Financial Strategies by Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 73-88</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>Poverty is still relatively high, especially among women. On the one hand the gap in work participation between men and women still occurs. On the other hand women have the opportunity to overcome the problems of poverty and their families with flexible work and do not interfere with the task of taking care of the household. Entrepreneurship is the right choice but needs to be accompanied by inclusive finance that brings capital closer to women. Inclusive finance is characterized by access to business capital financing without collateral, one-stop financial transactions, availability of financing that exceeds demand and increased financial literacy including saving habits and increasing financial management capabilities. It aims to describe and analyze the application of inclusive financial strategies in sustainable poverty reduction for women and to explain and analyze the impact of poverty reduction on low-income women and their families. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that financing can increase business interest and stimulate business development, increase income and strengthen the role of women in the welfare of their families. Poverty alleviation through an inclusive financial strategy is effective in increasing the economy, capacity and role of women in the welfare of the family. An adequate selection and monitoring system has a profound effect on this success.</i></p> <p>Keywords: <i>financial inclusion; financial literacy; poverty alleviation; sustainability; welfare</i></p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Agus Widiarto <i>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten</i></p> <p><i>An Analysis on the Policy of Teacher Management in Indonesia</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 89-103</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers. This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.</i></p> <p>Keywords: <i>academic qualification; education quality; policy analysis; professional teacher; teacher certificate; teachers' management</i></p>	

ASPIRASI Jurnal Masalah-Masalah Sosial	
Vol. 11 No. 1 June 2020	ISSN: 286-6305
Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya	
<p>Anggalih Bayu Muh. Kamim <i>Universitas Gadjah Mada</i></p> <p><i>Ocean Grabbing in Indonesia and Malaysia: Notes of the Socio-Ecological Crisis due to Reclamation Projects</i></p> <p>Jurnal ASPIRASI Vol. 11 No. 1 June 2020 pp. 105-120</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This study explores the ocean grabbing phenomenon that arises as a result of the reclamation project undertaken to facilitate the expansion of urban capital. The case of reclamation projects in Indonesia and Malaysia is taken to be compared with the consideration of the method of spending and facilitation on urban capital investment through the reclamation project. The need for new land which has become the culprit of the reclamation project will be explored about the impact it has had on the socio-ecological crisis that coastal communities must suffer. This study is a literature review carried out by tracing research reports, journal articles, and online media coverage related to the problem being examined. This study was carried out by borrowing the definition of ocean grabbing made by Bennett, Govan, and Satterfield and the criteria they made to show socio-ecological crises arising in coastal communities due to the reclamation project. The results of the study show that reclamation projects in Indonesia and Malaysia pose serious ocean grabbing problems. First, reclamation projects in Indonesia and Malaysia have poor governance. Minimal public participation and inadequate planning are a way for the facilitation of urban capital expansion in the reclamation project. Second, the reclamation project has worsened the living conditions of coastal communities due to loss of catchment area, decreased income, and deprived the community of its living space. Third, the reclamation project has caused damage to the ecosystem which has broken the balance of the environment in marine waters.</i></p> <p>Keywords: <i>investment; ocean grabbing; reclamation project</i></p>	